

TANTANGAN MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DALAM BUDAYA PATRIARKI

Nanang Hasan Susanto
Dosen STAIN Pekalongan
nananghasansusanto80@gmail.com

Abstract: *Although the issue of gender equality to be a demand in almost all countries, but the fact is not easy to achieve gender equality. This appearance infected the construct of cultural patriarchy since long time ago for discriminating roles of men and women. This Social Construct go on from generation to generation. Actually, there is still hope for realize the gender equality, although it requires a process. Among them is through education by providing adequate access to women, to exercise control over every policy of gender bias, involving women to provide participation, and provide equitable benefits between men and women.*

Keywords: *Gender Equality, Cultural Patriarchy*

Abstrak: *Meskipun isu kesetaraan Gender (genderequality) menjadi tuntutan hampir di semua Negara, namun faktanya tidak mudah untuk mewujudkan kesetaraan gender. Hal ini dikarenakan konstruk budaya masyarakat melalui budaya Patriarki yang membeda-bedakan peran laki-laki dan perempuan. Konstruk budaya ini sudah berlangsung lama dari generasi ke generasi. Sebenarnya masih ada harapan untuk mewujudkan kesetaraan gender, meskipun membutuhkan proses, karena merubah budaya membutuhkan waktu yang cukup lama. Diantaranya adalah melalui pendidikan dengan pemberian akses yang cukup kepada perempuan, melakukan kontrol terhadap setiap kebijakan yang bias gender, melibatkan perempuan untuk memberikan partisipasinya, dan memberikan benefit yang adil antara laki-laki dan perempuan.*

Kata Kunci: *Kesetaraan Gender, Budaya Patriarki*

PENDAHULUAN

Diskursus mengenai kesetaraan gender tetap faktual dan terus menguat dari waktu ke waktu. Hal ini seiring dengan tuntutan persamaan (*equility*) yang terus menggema tidak hanya di negara-negara yang memiliki peradaban tinggi, tapi juga mulai merasuk ruang-ruang diskusi pada negara-negara berkembang. Meskipun Negara Islam sebagai representasi negara

berkembang atau sering disebut sebagai negara dunia ketiga, sering mengklaim kalau ajara agamanya sudah mengkampanyekan isu kesetaraan gender sejak 14 abad yang lalu (Q.S. Al-Hujarat : 13), namun faktanya berbagai ketidakadilan gender masih terus terjadi di berbagai sendi kehidupan negara muslim.

Fenomena masih terjadinya ketidaksetaraan (baca: bias) gender, lebih

disebabkan masih berlangsungnya budaya patriarkiyang dianut oleh sebagian besar bangsa-bangsa di dunia. Pandangan bahwa laki-laki lebih kuat, lebih perkasa, lebih berhak menduduki peran-peran penting telah mengkonstruksi tatanan budaya yang lebih memihak laki-laki daripada perempuan. Konstruksi budaya ini terus berlangsung dari abad ke abad dan dari generasi ke generasi, sehingga masyarakat kita susah membedakan antara apa yang disebut “kodrat” dengan “konstruksi budaya” sebagai produk hasil cipta karya manusia.

Berkaitan dengan diferensiasi antara kodrat dengan konstruksi budaya, Nasaruddin Umar memberikan pengertian gender sebagai suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya. (Nasarudin Umar dalam <https://phierda.wordpress.com>). Gender dalam arti tersebut mengidentifikasi laki-laki dan perempuan dari sudut nonbiologis. Tapi lebih kepada karakter, sebagai sifat yang bisa dikonstruksi oleh budaya. Gender melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan, dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan perkasa. Pandangan bahwa sifat-sifat itu bukan merupakan kodrat tapi hasil

konstruksi sosial, dapat dilihat pada kenyataan, bahwa faktanya ada laki-laki yang emosional dan lemah lembut. Sementara itu, ada juga perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. Pemahaman masyarakat yang mencirikan laki-laki dan perempuan dengan bias gender itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain.

Berbeda dengan pengertian gender sebagai hasil konstruksi sosial budaya masyarakat, Sex atau jenis kelamin lebih bermakna kodrati. Yakni perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari aspek jenis kelamin dan berbagai ketentuan biologis yang tidak dapat dirubah. Misalnya saja laki-laki memiliki jakun, penis dan sperma. Sedangkan perempuan memiliki vagina, payudara (asi), ovum, rahim, haid, hamil, melahirkan dan menyusui.

Meskipun sudah menjadi konstruksi sosial budaya masyarakat dan berlangsung lama, namun persoalan ketidaksetaraan gender semakin menyita perhatian banyak kalangan untuk dicarikan solusi, hal mana merupakan cita-cita mulia untuk mewujudkan keadilan sosial yang seutuhnya. Tulisan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan kesetaraan gender, dengan membedah secara teoritis mengenai berbagai tantangan faktual mewujudkan kesetaraan gender dalam budaya patriarki.

PEMBAHASAN

Budaya Patriarki

Menurut Bressler, Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Ayah memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak dan harta benda. Secara tersirat sistem ini melembagakan pemerintahan dan hak istimewa laki-laki dan menuntut subordinasi perempuan (Charles E, Bressler, 2007).

Lebih jauh, Bressler merinci Patriarki sebagai konsep yang digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, terutama dalam antropologi dan studi referensi feminitas. Patriarki juga bermakna sebagai distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki memiliki keunggulan dalam satu atau lebih aspek, seperti penentuan garis keturunan (keturunan patrilineal eksklusif dan membawa nama belakang), hak-hak anak sulung, otonomi pribadi dalam hubungan sosial, partisipasi dalam status publik dan politik atau agama atau atribusi dari berbagai pekerjaan pria dan wanita ditentukan oleh pembagian kerja secara seksual(Charles E, Bressler, 2007).

Rueda mengatakan bahwa patriarki adalah penyebab penindasan terhadap perempuan (Rueda dalam <https://phierda.wordpress.com>). Masyarakat yang menganut sistem patriarki meletakkan laki-laki pada posisi dan kekuasaan yang dominan

dibandingkan perempuan. Laki-laki dianggap memiliki kekuatan lebih dibandingkan perempuan. Di semua lini kehidupan, masyarakat memandang perempuan sebagai seorang yang lemah dan tidak berdaya.

Menurut Masudi seperti yang dikutip Faturochman, sejarah masyarakat patriarki sejak awal membentuk peradaban manusia yang menganggap bahwa laki-laki lebih kuat (*superior*) dibandingkan perempuan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun bernegara. Kultur patriarki ini secara turun-temurun membentuk perbedaan perilaku, status, dan otoritas antara laki-laki dan perempuan di masyarakat yang kemudian menjadi hirarki gender (Faturochman, 2002: 16).

Pada kesempatan yang lain, Muhadjir mengatakan bahwa permasalahan marginalisasi yang dihadapi oleh perempuan terletak pada budaya patriarki, yaitu nilai-nilai yang hidup dimasyarakat, yang memposisikan laki-laki sebagai superior dan perempuan subordinat. Budaya patriarki seperti ini tercermin dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sekaligus menjadi sumber pembenaran terhadap sistem distribusi kewenangan, sistem pengambilan keputusan, sistem pembagian kerja, sistem kepemilikan dan sistem distribusi *resources* yang bias gender. Kultur yang demikian ini akhirnya akan bermuara pada terjadinya perlakuan

diskriminasi, marginalisasi, eksploitasi maupun kekerasan terhadap perempuan (Muhadjir, 2005: 166).

Dampak yang Ditimbulkan Budaya Patriarki

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun, yang menjadi persoalan, konstruk sosial yang dibangun dalam budaya Patriarki dalam melihat perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan khususnya bagi perempuan.

Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam pelbagai bentuk, yaitu:

1. Marginalisasi atau proses peminggiran/pemiskinan, yang mengakibatkan kemiskinan secara ekonomi. Contoh marginalisasi dapat dilihat pada kasus program Revolusi Hijau pada masa orde baru, yang hanya terfokus kepada laki-laki. Misalnya penyelenggaraan pelatihan pertanian yang hanya ditunjukkan untuk petani laki-laki. Karenanya, banyak petani perempuan yang tergusur dari sawah dan pertanian. Di luar dunia pertanian, banyak sekali pekerjaan yang dianggap lebih pantas dilakukan perempuan. Seperti pembantu rumah tangga, Guru TK, dan lain-lain. Pekerjaan perempuan ini dianggap

lebih rendah dari pekerjaan laki-laki, dan seringkali berpengaruh terhadap perbedaan gaji antara kedua jenis pekerjaan tersebut (Mansour Fakih, 2008: 76-77).

2. Subordinasi atau penomorduaan, pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari laki-laki. Sebagai contoh dalam memperoleh hak-hak pendidikan, biasanya anak perempuan tidak mendapat akses yang sama dibanding laki-laki. Ketika ekonomi keluarga terbatas, maka hak untuk mendapatkan pendidikan lebih diprioritaskan kepada anak laki-laki, padahal kalau diperhatikan belum tentu anak perempuan tidak mampu (Mursyidah, 2013).
3. Stereotipe. Yaitu citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan. Misalnya pandangan terhadap perempuan yang tugas dan

fungsinya hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan domestik atau kerumaha-tangaan. Label kaum perempuan sebagai “ibu rumah tangga” merugikan, jika hendak aktif dalam “kegiatan laki-laki” seperti berpolitik, bisnis atau birokrat. Sementara label laki-laki sebagai pencari nafkah utama (*breadwinner*) mengakibatkan apa saja yang dihasilkan oleh perempuan dianggap sebagai sambilan atau tambahan dan cenderung tidak diperhitungkan (Mursyidah. 2013). Contoh seperti ini dapat kita lihat pada pekerjaan sebuah keluarga. Supir yang dianggap sebagai pekerjaan laki-laki seringkali dibayar lebih tinggi dibanding pembantu rumah tangga yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan. Meskipun tidak ada yang menjamin, kalau pekerjaan supir lebih berat dan lebih sulit dibanding memasak dan mencuci.

4. Kekerasan (*violence*), adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan ini mencakup kekerasan fisik seperti pemerkosaan dan pemukulan, sampai kekerasan dalam bentuk yang lebih halus seperti pelecehan (*sexual harassment*), dan penciptaan

ketergantungan. Banyak sekali kekerasan terhadap perempuan yang terjadi karena adanya stereotipe gender. Banyak terjadi pemerkosaan bukan karena kecantikan, namun karena kekuasaan stereotipe gender yang dilekatkan kepada perempuan (Mansour Fakih, 2008: 79).

5. Beban ganda, adalah beban yang harus ditanggung oleh perempuan secara berlebihan. Berbagai observasi menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga. Sehingga bagi mereka yang bekerja, selain bekerja di tempat kerja, juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Sosialisasi peran gender seperti itu menimbulkan rasa bersalah dalam diri perempuan jika tidak menjalankan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Sedangkan bagi kaum laki-laki, tidak saja merasa bukan tanggung jawabnya, bahkan di banyak tradisi, laki-laki dilarang terlibat dalam pekerjaan domestik (Mansour Fakih, 2008: 80).

Menurut Mansour Fakih, berbagai manivestasi ketidakadilan gender tidak bisa dipisah-pisahkan, karena saling berhubungan antara satu dan lainnya. Tidak ada satupun manivestasi ketidakadilan gender yang lebih penting, lebih

esensial dari yang lain. Misalnya, marginalisasi ekonomi kaum perempuan justru terjadi karena stereotipe tertentu atas kaum perempuan dan hal itu menyumbang kepada terwujudnya subordinasi, kekerasan kepada kaum perempuan, yang akhirnya tersosialisasikan dalam ideologi, dan visi kaum perempuan sendiri. Dengan demikian, kita tidak bisa menyatakan bahwa marginalisasi kaum perempuan adalah yang paling menentukan dan terpenting dari yang lain, dan oleh karena itu mendapat perhatian lebih. Atau sebaliknya, bahwa kekerasan fisik (*violence*) adalah masalah paling mendasar yang harus dipecahkan terlebih dahulu (Mansour Fakih, 2008: 13-14).

Berlangsungnya budaya Patriarki di lingkungan kehidupan kita memang tidak terlihat, tapi bisa dirasakan dengan jelas. Ketidakadilan sistem ini pada hakekatnya tidak hanya merugikan perempuan saja, tapi juga merugikan laki-laki, karena dimanapun, ketidakadilan muaranya adalah konflik, atau tatanan kehidupan yang tidak nyaman. Hal ini sebagaimana yang disebut dalam teori sosial konflik.

Berbeda dengan pendekatan teori struktural-fungsional yang menempatkan keluarga sebagai institusi dengan sistem struktur yang menempatkan kedudukan suami, istri, dan anak-anak pada posisi vertikal, sehingga peran, hak, kewajiban, tanggung jawab sangat ditentukan oleh

hierarki patriakal. Menurut teori sosial konflik, struktur yang vertikal tersebut sangat potensial untuk menimbulkan konflik berkepanjangan di dalam keluarga. Karena sistem struktur yang hierarkis seringkali menciptakan situasi yang tidak demokratis dimana pembagian sumberdaya yang terbatas (kekuasaan, kesempatan, keputusan-keputusan keluarga) berlaku mutlak tanpa proses negosiasi antaranggota keluarga.

Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Budaya Patriarki

Menurut Koentjaraningrat, Budaya dan ideologi bukan satu hal yang turun dari langit. Ia di bentuk oleh manusia dan disosialisasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Koentjaraningrat mengatakan nilai budaya adalah faktor mental yang menentukan perbuatan seseorang atau masyarakat (Koentjaraningrat, 1974).

Berdasarkan tesis Koentjaraningrat di atas, maka mewujudkan kesetaraan gender bukan hal yang tidak mungkin dilakukan oleh suatu kelompok atau suatu Bangsa, meskipun budaya Patriarki sudah berlangsung lama. Mewujudkan kesetaraan gender merupakan agenda jangka panjang yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Karena merubah budaya yang diawali dari perubahan mental dalam memandang sesuatu, membutuhkan waktu.

Pendidikan merupakan kunci terwujudnya keadilan gender dalam masyarakat, termasuk yang menganut budaya patriarki. Karena pendidikan merupakan alat untuk mentransfer norma-norma masyarakat, pengetahuan dan kemampuan mereka. Dengan kata lain, lembaga pendidikan merupakan sarana formal untuk sosialisasi sekaligus transfer nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, termasuk nilai dan norma gender. Untuk itu sejak awal perlu diupayakan terwujudnya keadilan gender dalam lembaga pendidikan.

Berawal dari miskin pendidikan, dampaknya akan berpengaruh terhadap kemiskinan pada aspek yang lainnya, seperti pada akses terhadap pekerjaan, politik dan pengambilan keputusan. Perempuan yang tidak mempunyai sumber daya pribadi berupa pendidikan dengan sendirinya akan sangat sulit untuk mengakses pekerjaan terutama di sektor formal yang relatif berubah tinggi. Wilayah pekerjaan mereka biasanya terbatas pada sektor informal yang berupah rendah seperti buruh kasar atau pembantu rumah tangga.

Ketimpangan gender dalam pendidikan, antara lain berwujud kesenjangan memperoleh kesempatan yang konsisten pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Perempuan cenderung memiliki kesempatan pendidikan yang lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Semakin tinggi

jenjang pendidikan, semakinlebar kesenjangan. Kesenjangan ini pada gilirannya membawa kepada berbedanya rata-rata penghasilan laki-laki dan perempuan.

Ketimpangan gender dalam pendidikan dapat pula diamati dari segi isi buku pelajaran. Kebanyakan muatan buku pelajaran, khususnya Bahasa dan Sastra, IPS, PPKN, Pendidikan Jasmani, Kesenian dan sejenisnya, yang membahas kedudukan perempuan dalam masyarakat cenderung masih menganut nilai-nilai yang bias gender. Perempuan dalam buku-buku tersebut masih ditempatkan dalam peran-peran domestic (*domestic roles*), sebaliknya laki-laki diposisikan dalam peran-peran publik (*productive roles*). Dengan demikian, isi buku-buku tersebut masih mengakui adanya segregasi ruang yang ketat antara laki-laki dan perempuan; laki-laki di ruang publik, sedangkan perempuan di ruang domestik. Kurikulum dan materi pelajaran yang belum mengacu kepada prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender akan menyebabkan perempuan tetap tidak mempunyai mentalitas sebagai warga masyarakat yang produktif (Mursyidah, 2013).

Berbagai hasil penelitian mengungkapkan, bahwa kesenjangan gender bukan diakibatkan oleh satu faktor tunggal, melainkan terdapat beberapa faktor yang saling kait mengkait. Setidaknya, dapat disebutkan empat faktor utama, yakni

faktor akses, kontrol, partisipasi dan benefit. Dalam pendidikan, faktor akses terlihat nyata dalam proses penyusunan kurikulum dan proses pembelajaran yang cenderung bias laki-laki (*bias toward male*). Dalam kedua proses ini harus diakui proporsi laki-laki sangat dominan. Indikasinya dapat dilihat pada penulis buku-buku pelajaran dalam berbagai bidang studi yang mayoritas adalah laki-laki. Selain itu, jumlah tenaga pengajar, khususnya pada SLTP ke atas lebih didominasi laki-laki. Akibatnya, proses pembelajaran menjadi bias laki-laki (*bias against female*). Kondisi ini semakin diperburuk oleh kenyataan bahwa sensitivitas gender masyarakat, baik laki-laki dan perempuan masih sangat rendah.

Selain akses, faktor kontrol juga turut andil dalam mewujudkan bias gender. Pada aspek pendidikan, kontrol terhadap kebijakan pendidikan lebih didominasi laki-laki, mengingat laki-laki lebih banyak berada pada posisi strategis dalam pengelolaan pendidikan, terutama dalam jabatan struktural, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat yang paling rendah. Hal itu menyebabkan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan relatif masih rendah. Akibatnya, sejumlah kebijakan dalam pendidikan dipandang belum sensitif gender.

Selanjutnya adalah faktor partisipasi perempuan yang rendah. Pada aspek

pendidikan, hal ini terlihat pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, seperti SMK dan PT. Setidaknya ada tiga alasan yang sering dikemukakan berkenaan dengan hal ini. *Pertama*, tidak tersedianya sarana dan prasarana sekolah untuk jenjang pendidikan SLTP ke atas di daerah sekitar tempat tinggal. Karena alasan jarak dan keselamatan selama perjalanan menuju ke sekolah menyebabkan banyak orang tua keberatan menyekolahkan anak perempuannya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. *Kedua*, relative tingginya biaya pendidikan. Biaya pendidikan masih belum terjangkau oleh kebanyakan penduduk, khususnya yang tidak mampu. *Ketiga*, masih dianutnya sejumlah norma yang merugikan perempuan, misalnya pandangan yang menyatakan bahwa anak perempuan lebih diperlukan dalam membantu orang tua menyelesaikan tugas sehari-hari di rumah, sedangkan anak laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk membantu menambah penghasilan keluarga.

Terakhir, faktor benefit terlihat dari dominannya laki-laki dalam posisi sebagai penentu kebijakan, khususnya dalam lembaga birokrasi di bidang pendidikan, demikian juga pada jabatan-jabatan akademis kependidikan. Karena itu, laki-laki lebih banyak menikmati posisi strategis dalam jabatan-jabatan struktural (Mursyidah,2013).

Untuk mewujudkan kesetaraan gender, keempat faktor diatas perlu segera dicari solusinya. Diperlukan upaya sungguh-sungguh dari semua pihak untuk mewujudkan kesetaraan gender, hal mana merupakan salah satu sendi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana cita-cita bersama.

Perbedaan gender pada prinsipnya adalah sesuatu yang wajar dan merupakan *sunnatullah* sebagai sebuah fenomena kebudayaan. Perbedaan itu tidak akan menjadi masalah jika tidak menimbulkan ketidakadilan. Namun pada kenyataannya perbedaan tersebut melahirkan berbagai ketidakadilan baik bagi kaum laki-laki terutama kepada kaum perempuan (Ridwan, 2006: 25)

Memperjuangkan kesetaraan bukanlah berarti mempertentangkan dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Sekali lagi bukanlah mempertentangkan laki-laki dan perempuan, tetapi lebih kepada upaya membangun hubungan (relasi) yang setara. Kesempatan harus terbuka sama luasnya bagi laki-laki dan perempuan, sama pentingnya untuk mendapatkan pendidikan, makanan yang bergizi, kesehatan, kesempatan kerja, dan sebagainya.

Upaya mewujudkan kesetaraan gender tidak boleh diartikan juga sebagai upaya untuk menyamakan secara sporadis antara laki-laki dan perempuan. Tawney

dikutip Megawangi mengakui adanya keragaman pada manusia, entah itu biologis, aspirasi, kebutuhan, kemampuan, ataupun kesukaan, cocok dengan paradigma inklusif. Ia mengatakan bahwa konsep yang mengakui faktor spesifik seseorang dan memberikan haknya sesuai dengan kondisi perseorangan, atau disebut "*person-regarding equality*". Kesetaraan ini bukan dengan memberi perlakuan sama kepada setiap individu agar kebutuhannya yang spesifik dapat terpenuhi, konsep ini disebut "kesetaraan kontekstual". Artinya, kesetaraan adalah bukan kesamaan (*sameness*) yang sering menuntut persamaan matematis, melainkan lebih kepada kesetaraan yang adil yang sesuai dengan konteks masing-masing individu (Ratna Megawangi, 1999).

Kesetaraan gender pada gilirannya akan menghasilkan "deviden" ganda. Perempuan yang sehat, berpendidikan, berdaya akan memiliki anak-anak perempuan dan laki-laki yang sehat, berpendidikan dan percaya diri. Pengaruh perempuan yang besar dalam rumah tangga, telah memperlihatkan dampak yang positif pada gizi, perawatan kesehatan, dan pendidikan anak-anak mereka.

Menurut Collins yang dikutip Megawangi, bahwa keluarga yang ideal adalah yang berlandaskan *companionship*, yang hubungannya horizontal tidak hierarkis (Ratna Megawangi, 1999).

Keharmonisan keluarga sendiri merupakan aspek utama solidnya kehidupan sebuah masyarakat.

Last but not least, mewujudkan kesetaraan gender pada hakekatnya merupakan kepentingan kemanusiaan, dan karenanya kepentingan semua pihak. Dalam skala mikro, kesetaraan gender akan mewujudkan keluarga yang bahagia, hal mana akan menghasilkan keturunan yang kuat, kreatif dan mandiri. Dalam skala makro, kesetaraan gender akan mewujudkan iklim keadilan, memberikan ruang yang sebesar-besarnya bagi semua anak Bangsa untuk berkarya dan mengembangkan kreatifitasnya, Sehingga diharapkan akan terwujud Bangsa yang adil, mulia dan bermartabat.

PENUTUP

Mewujudkan keadilan sosial di antaranya dengan mewujudkan kesetaraan gender, pada hakekatnya merupakan kepentingan bersama. Karena ketidakadilan, dimanapun muaranya adalah terciptanya tatanan sosial yang tidak nyaman, *alienasi*, bahkan bisa menimbulkan konflik. Oleh karena itu, diperlukan upaya sungguh-sungguh dari semua pihak untuk mewujudkan kesetaraan gender, dengan merubah budaya Patriarki yang Nasarudin Umar, *Argumen kesetaraan gender dalam al-Qur'an*. (Jakarta: Paramadina), Tahun 1999.

sudah berlangsung lama dan turun temurun dari generasi ke generasi.

DAFTAR PUSTAKA

Charles E Bressler,. *Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice* 4th-ed. Pearson Education, Inc. 2007. ISBN-13:978-0-13-153448-3)

Faturochman. *Keadilan Perspektif Psikologi*. (Yogyakarta: Pustaka dan Fakultas Psikologi UGM), Tahun 2002.

H.M. Lips, *Sex and gender: An introduction*. London: Mayfield Publishing Company. Tahun 1993.

<https://phierda.wordpress.com> (dilihat tanggal 07 Oktober 2015)

Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 1974

Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Insist Press) Tahun 2008

Muhadjir Darwin, *Negara dan Perempuan: Reorientasi Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Media Wacana). 2005.

Mursyidah. *Pendidikan Berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Jurnal Muwâzâh, Vol. 5, No. 2, Desember 2013

Puspitawati, H. *Modul Pendidikan Adil Gender Dalam Keluarga*. Makalah (Tidak diterbitkan). Jakarta: Dirjen

Kelautan, Pesisir, Dan Pulau-Pulau
Kecil DKP, Tahun 2007.

Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda?*
Sudut Pandang Baru Tentang Relasi

Gender, Bandung: Mizan), Tahun
1999

Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*,
(Yogyakarta: Fajar Pustaka), Tahun
2006